

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 4 Februari 2021



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antarane.ws.com	Rabu, 3 Februari 2021	Target 100 Persen Akses Air Minum, PUPR Dorong Pembiayaan Alternatif	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mendorong optimalisasi pembiayaan alternatif untuk mencapai target 100 persen akses air minum di Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan prasarana dan sarana air minum merupakan infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan.</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1981065/target-100-persen-akses-air-minum-pupr-dorong-pembiayaan-alternatif</p> <p>https://akurat.co/ekonomi/id-1269768-read-menteri-pupr-diperlukan-inovasi-pembiayaan-guna-target-100-persen-akses-air-minum</p>
2	Wartaekonomi.co.id	Rabu, 3 Februari 2021	Bedah Rumah PUPR Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat secara tidak langsung ikut membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).</p> <p>https://www.wartaekonomi.co.id/read326105/bedah-rumah-pupr-dukung-pemulihan-ekonomi-nasional</p>
3	Beritadaerah.co.id	Rabu, 3 Februari 2021	PON XXI di Aceh dan Sumut, Kementerian PUPR Bahas Persiapan Infrastruktur	<p>Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 rencananya akan di selenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PON XXI 2024 merupakan kali pertama PON diselenggarakan di dua tempat (provinsi). Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terpilih sebagai tuan rumah bersama penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Rapat Tahunan KONI Pusat 2018. Namun Surat Keputusan (SK) penetapan resmi tersebut baru diberikan oleh Menpora pada November 2020 setelah dilakukan revisi aturan PP Nomor 17 tahun 2007. Sebab aturan lama hanya mengenal satu provinsi untuk menjadi tuan rumah. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membahas persiapannya.</p> <p>https://www.beritadaerah.co.id/2021/02/03/pon-xxi-di-aceh-dan-sumut-kementerian-pupr-bahas-persiapan-infrastruktur/</p>
4	Pikiran-rakyat.com	Rabu, 3 Februari 2021	Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Tanggul 7,2 KM Pekalongan Jateng	<p>Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan yang menggunakan sistem polder berupa long storage dengan tanggul pembatas atau disebut tanggul rob sepanjang 7,2 km.</p> <p>https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/selasar/pr-1421374660/kementerian-pupr-rampungkan-pembangunan-tanggul-72-km-pekalongan-jateng</p>
5	Cnnindonesia.com	Kamis, 4 Februari 2021	17 Jalan Tol Baru Pada 2021	<p>Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan ada 17 ruas jalan tol baru yang selesai dibangun pada 2021. Total panjang seluruh ruas tol mencapai 410 kilometer (km).</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204074544-92-602061/17-jalan-tol-baru-pada-2021</p>

6	Cnnindonesia.com	Rabu, 3 Februari 2021	PUPR Akan Pakai Kecerdasan Buatan Pantau Retak Tol Trans Jawa	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk mendeteksi lubang dan retak di Tol Trans Jawa. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210202212104-92-601542/pupr-akan-pakai-kecerdasan-buatan-pantau-retak-tol-trans-jawa
7	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Kamis, 4 Februari 2021	3 Proyek KPBU Ditawarkan Tahun Ini	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menawarkan tiga proyek sektor perumahan senilai Rp2,75 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha pada tahun ini.
8	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 3	Kamis, 4 Februari 2021	BPJT Usulkan Insentif Untuk Calon Investor	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengusulkan insentif guna memancing masuknya pemodal baru untuk proyek jalan tol.
9	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 1	Kamis, 4 Februari 2021	Mengecek Standar Menjelang Kenaikan Tarif	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR akan menilai standar pelayanan minimal (SPM) operator jalan tol sebelum mengizinkan mereka menaikkan tarif.
10	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2	Kamis, 4 Februari 2021	Infografis	Standar wajib sebelum naik tarif. Pengelola jalan tol wajib memenuhi berbagai ketentuan sebelum menaikkan tarif.

Judul	3 Proyek KPBU Ditawarkan Tahun Ini	Tanggal	Kamis, 4 Februari 2021
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menawarkan tiga proyek sektor perumahan senilai Rp2,75 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha pada tahun ini.		

| INVESTASI PERUMAHAN |

3 PROYEK KPBU DITAWARKAN TAHUN INI

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menawarkan tiga proyek sektor perumahan senilai Rp2,75 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha pada tahun ini.

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

Ketiga proyek perumahan itu adalah pembangunan rumah susun (rusun) di Cisaranten Bina Harapan Bandung, Jawa Barat; di Medan, Sumatra Utara; dan di Karawang, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan ketiga proyek itu masuk dalam tahap kajian akhir prastudi kelayakan atau *final business case* (FBC).

"FBC di tahapan yang lebih siap untuk ditawarkan. Rusun Cisaranten Bina Harapan, Bandung, Ekspektasinya Agustus tahap prakualifikasi," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (3/2).

Dia menjelaskan penawaran investasi dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek perumahan itu dilakukan sebagai upaya mengurangi kekurangan pasokan atau *backlog* perumahan.

Nantinya, skema KPBU sektor perumahan ditawarkan tidak hanya kepada pengembang atau *developer* properti saja tetapi juga kepada kontraktor, maupun investor yang murni investasi.

Eko menjelaskan pihak swasta maupun investor dapat terlibat langsung mulai dari proses pembuatan desain, pembangunan, hingga pengembangannya.

Melalui skema KPBU, imbuhnya, swasta akan diberikan hak konsesi untuk jangka waktu tertentu. Bila masa konsesinya telah berakhir,

tegasnya, pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah.

Adapun, hunian yang dibangun dengan skema KPBU ini akan berada di lahan milik negara yang berada di perkotaan dengan sistem sewa atau dengan kata lain bukan hak milik.

"Investornya belum tentu pengembang. Bisa juga swasta sebagaimana yang terjadi untuk proyek KPBU yang sudah berjalan," ucapnya.

Terkait dengan insentif yang akan berikan kepada swasta, Eko menuturkan hal itu sesuai dengan penghitungan dan melalui studi kelayakan.

"Bentuk dukungan pemerintah seperti apa yang tepat agar investasi layak, disiapkan dalam studi kelayakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan pengembang enggan terlibat dalam pembangunan proyek perumahan dengan skema KPBU.

Alasannya, hunian yang dibangun dengan skema KPBU tidak untuk hak milik melainkan hanya sewa.

"Kalau sewa buat apa sekarang kan orang inginnya punya rumah yang menjadi hak milik," ujarnya kepada *Bisnis*.

Pembangunan hunian dengan skema KPBU pun berada di lahan negara dan juga belum tentu berada di tengah perkotaan.

Untuk dapat mengurangi *backlog* perumahan, dia menyarankan pemerintah melakukan kemudahan

bayaran hunian rumah bersubidi dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

"Saat ini untuk masyarakat yang *nonfixed income* sangat susah mengakses pembiayaan rumah, terlebih di tengah kondisi saat ini," tutur Paulus.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal mengatakan proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki profitabilitas atau kelayakan finansial tinggi semestinya diprioritaskan kepada swasta.

Untuk proyek PSN yang swasta sulit masuk karena risiko yang tinggi baru diberikan ke BUMN.

"Karena swasta tidak akan *invest* ke proyek yang profitabilitas rendah apalagi jika risikonya relatif tinggi," katanya.

Dia tak menampik jika dalam kondisi ekonomi yang tengah tertekan karena pandemi Covid-19 seperti saat ini tantangan untuk melibatkan pihak swasta juga lebih besar. "Karena merata kondisi keuangan swasta juga terdampak," ucap Faisal.

Dalam situasi terbatasnya APBN di tengah pandemi Covid-19 ini tak ada jalan lain agar proyek PSN terus berjalan yakni dengan terus mengalokasikan pola KPBU atau *blended finance*.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rusun sebanyak 9.799 unit dengan anggaran Rp4,16 triliun.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR



Ekspektasinya Agustus tahap prakualifikasi.

Khalawi Abdul Hamid mengatakan rusun yang akan dibangun tersebut terdiri atas 5.158 unit baru atau 131 menara. Untuk yang kontrak tahun majemuk (*multiyears contract/MYC*) sebanyak 4.641 unit rusun atau 111 menara.

"Jadi dalam total 9.799 unit rusun tersebut, terdapat 111 menara yang MYC. Dengan demikian unit rusun yang baru hanya 131 tower. Anggarannya Rp4,16 triliun," kata Khalawi.

Pada tahun yang sama, Kementerian PUPR juga siap membangun sebanyak 865 unit rusun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR, kemudian 1.448 rusunawa untuk pekerja, 2.385 unit rusun bagi ASN dan 468 unit bagi TNI Polri.

Khusus rusunawa untuk lembaga pendidikan berasrama sebanyak 1.875 unit dan rusunawa untuk perguruan tinggi sebanyak 2.758

unit.

Secara total, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program pembangunan perumahan pada 2021 sebesar Rp8,093 triliun.

Alokasi anggaran tersebut ternyata lebih kecil 4,5% dibandingkan dengan pagu anggaran perumahan 2020 yang mencapai Rp8,48 triliun.

Beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rusun, pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum, dan pembangunan rumah khusus (rusus) serta untuk sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, perencanaan serta kepatuhan internal.

Berdasarkan data Ditjen Perumahan, dari pagu yang ada jumlah alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan rusun.

Pembangunan rusun dinilai sangat efektif untuk mendorong masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal serta memanfaatkan lahan perumahan secara maksimal.

Khalawi menuturkan salah satu tujuan program perumahan yang ingin dicapai Kementerian PUPR adalah mendorong dan meningkatkan pemenuhan rumah layak huni terutama untuk kelompok MBR.

Bila menengok alokasi anggaran rusun pada 2020, jumlah alokasi anggaran rusun 2021 lebih besar 32% karena alokasi dana rusun tahun lalu hanya Rp3,14 triliun untuk membangun sebanyak 4.799 unit rusun. (Andi M. Arieli) □



Penyediaan rumah yang layak huni terus diprogramkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sayangnya, alokasi anggaran program pembangunan perumahan cenderung mengecil sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program pembangunan perumahan sebesar Rp8,093 triliun atau turun 4,5% dibandingkan dengan 2020.

Target Bantuan Pembiayaan Perumahan 2021		
Skema	Anggaran	Unit rumah (unit)
FLPP	Rp16,06 triliun	157.500
BP2BT	Rp8,7 miliar	218
SSB	Rp5,96 triliun	-
SBUM	Rp630 miliar	157.500

Prioritas Pembangunan Rumah Susun 2021

Unit rusun baru	: 5.158 unit	: 131 menara
Multi Years Contract (MYC)	: 4.641 unit	: 111 menara

Rencana Strategis Pembangunan Rumah Kementerian PUPR 2020-2024 (unit)

Kategori	Jumlah
SMF	50.000
Subsidi BP2BT	100.000
BP Tapera	500.000
Subsidi perumahan FLPP/SSB - SBUM	900.000
Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat	3.450.000

Sumber: RPJMN Kementerian PUPR
SMF: Sarana Multifungsi Finansial, MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah, BP2BT: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan



Backlog Perumahan di Indonesia Per 2020 (juta unit)

Kategori	Jumlah
Rumah untuk MBR non fixed income	6,48
Rumah untuk MBR fixed income	1,72
Rumah untuk non-MBR	0,56
Rumah Tidak Layak Huni	2,36

Sumber: Kementerian PUPR, diolah

Bisnis/lys

Judul	BPJT Usulkan Insentif Untuk Calon Investor	Tanggal	Kamis, 4 Februari 2021
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 3		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengusulkan insentif guna memancing masuknya pemodal baru untuk proyek jalan tol.		

EKONOMI DAN BISNIS

BPJT Usulkan Insentif untuk Calon Investor

Investasi jalan tol ditargetkan tumbuh hingga Rp 1.106 triliun pada 2024.

EDISI, 4 FEBRUARI 2021



REPORTER: YOHANES PASKALIS



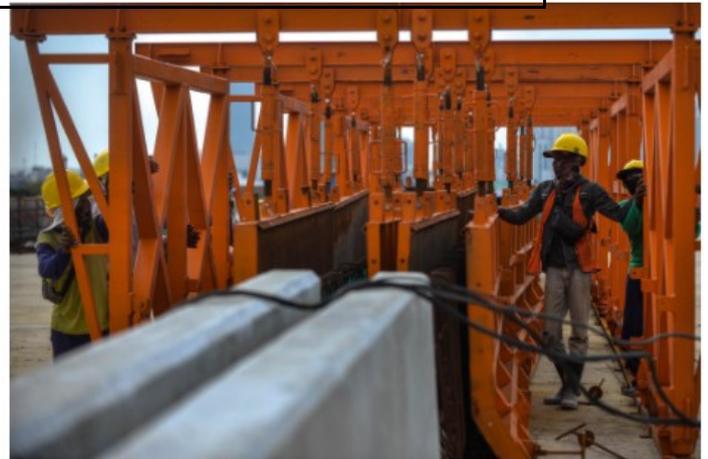
Pengerjaan pembangunan jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, 3 Februari 2021. Tempo/Tony Hartawan

JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan insentif guna memancing masuknya [pemodal baru untuk proyek jalan tol](#).

Anggota BPJT dari unsur akademikus, Eka Pria Anas, mengatakan investasi baru bisa mengalir lewat proyek yang diprakarsai perusahaan swasta ataupun pengembangan ruas jalan tol lama. “Insentif ini harus mengarah pada proyek di luar penugasan pemerintah. Harus dipisahkan mana tugas negara dan investasi baru,” kata dia, kemarin.

Menurut Eka, para investor bisa dirangsang dengan tawaran konsesi yang lebih panjang dari rata-rata saat ini yang mencapai 40-50 tahun. Ada juga usul bantuan pendanaan untuk pengadaan lahan yang biasanya dihitung dalam kebutuhan investasi jalan tol. Jaminan ini bisa diatur pada awal kontrak pembangunan. “Saat biaya lahannya melebihi jumlah tertentu, bisa dibantu sebagian oleh pemerintah,” kata Eka.

Berdasarkan data BPJT, pemerintah sudah mengoperasikan 2.346 kilometer jalan tol hingga akhir tahun lalu. Tahun ini [target panjang jalan tol](#) mencapai 2.756 kilometer. Pada 2024, target panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 4.500 kilometer. Saat itu transaksi jalan tol diperkirakan mencapai 7 juta kendaraan setahun, di atas tahun ini yang sebanyak 4 juta transaksi.



Pembangunan jalan tol layang dalam kota ruas Kelapa Gading-Pulo Gebang di Kelapa Gading, Jakarta, 13 Oktober 2020. Tempo/Tony Hartawan

Eka mengatakan BPJT mempromosikan manfaat pembangunan jalan tol kepada pengembang kawasan. Pengelola hunian terintegrasi (*transit-oriented development*), *real estate*, serta kawasan ekonomi khusus bisa memprakarsai proyek jalan tol baru. Dengan demikian, kata Eka, orientasi proyek jalan tol tak hanya untuk menunggu *break even point* (nilai impas pengembalian investasi). “Tapi ada sumber *value* lain, yaitu potensi dari kawasannya,” ucap dia. “Selain dari transaksi tol, pendapatan bisa berasal dari industri atau wisata di sekitar jalan tol itu.”

Dalam diskusi virtual pada Selasa lalu, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan lembaganya menasar kenaikan investasi jalan tol sebesar 21,6 persen, dari Rp 729,5 triliun pada 2020 menjadi Rp 887,4 triliun tahun ini. Investasi asing ditargetkan mencapai Rp 20 triliun, dua kali lipat dari 2020 sebesar Rp 9,9 triliun.



Danang Parikesit. Tempo/Prati Dostari

Menurut Danang, BPJT akan melelang [sembilan proyek unsolicited](#) atau prakarsa swasta pada kuartal pertama 2021, dengan nilai investasi Rp 142,5 triliun. Pada semester dua, ada beberapa proyek lain yang akan ditawarkan kepada investor.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan infrastruktur yang bersifat komersial, seperti jalan tol, menarik bagi pemodal asing. Namun minat investor sangat bergantung pada imbal balik keuntungan (*return of investment/ROI*). “Jika ROI bisa 9-12 persen per tahun ketika operasi, bisa menarik investor. Tapi kan tidak semua proyek punya ROI tinggi,” ujarnya. Bhima mengatakan pemerintah cenderung menambal pendanaan proyek yang tingkat komersialnya rendah dengan utang baru.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Carmelita Hartoto, mengatakan keinginan swasta untuk mengambil proyek kemitraan dengan pemerintah belum loyo pada masa pandemi Covid-19. Namun, kata dia, sebagian besar pengusaha akan lebih waspada mengucurkan modal. “Aspek kepastian berusaha menjadi krusial karena pengusaha cenderung menerapkan strategi agar bisa *survive* dulu.”

Judul	Mengecek Standar Menjelang Kenaikan Tarif	Tanggal	Kamis, 4 Februari 2021
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 1		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR akan menilai standar pelayanan minimal (SPM) operator jalan tol sebelum mengizinkan mereka menaikkan tarif.		

EKONOMI DAN BISNIS

Mengecek Standar Menjelang Kenaikan Tarif

Badan Perlindungan Konsumen meminta kenaikan tarif tol ditunda hingga Covid-19 terkendali.

EDISI 4 FEBRUARI 2021



REPORTER: TEMPO



Aktivitas bendahara bendahara di Gedung Tol Cibubur, Jakarta, 2 Februari 2021. Tempo/Tony Hartono

JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menilai standar pelayanan minimal (SPM) operator jalan tol sebelum mengizinkan mereka [menaikkan tarif](#). Upaya ini berkaitan dengan rencana kenaikan tarif 31 ruas jalan tol tahun ini.

Anggota BPJT dari unsur akademikus, Eka Pria Anas, mengatakan syarat pemenuhan SPM jalan tol tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014. Syarat tersebut harus terpenuhi menjelang jadwal perubahan tarif. "SPM ibarat rapor badan usaha jalan tol yang mengajukan penyesuaian tarif," ucapnya kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Anas pemeriksaan berkala menasar berbagai aspek, dari kondisi jalan yang harus bebas dari kerusakan, kecepatan tempuh ideal untuk jarak dalam kota dan antarkota, serta kelancaran transaksi di gardu tol. Pemerintah pun mewajibkan penataan area rehat agar sesuai dengan ketentuan, termasuk soal pemenuhan fasilitas berdasarkan tipe layanannya. "Sudah ada tahap pengajuan, pemeriksaan, sebelum akhirnya sosialisasi," tuturnya.

Kenaikan tarif tol akan berlaku di jalur Trans Jawa, Trans Sumatera, Sulawesi, hingga ruas tol dalam kota Jakarta dan Jabodetabek, seperti tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Ada juga pengajuan tarif baru dari pengelola ruas tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali.

Menurut Eka, kenaikan tarif tol yang seharusnya berlaku sejak tahun lalu ditunda akibat tekanan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Tahun ini, sejumlah operator mengajukan penyesuaian tarif, sesuai dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Kedua aturan itu memperbolehkan badan usaha jalan tol (BUJT) mengajukan penyesuaian tarif dua tahun sekali. Nilai kenaikan tarif memakai basis inflasi dan daya beli pengguna tol.



Eka mengatakan [penyesuaian tarif](#) dimaksudkan untuk mencegah kerugian BUJT yang sudah menerapkan efisiensi. "Kerugian lumayan besar karena bunga bank terus jalan, sementara *income* rendah, seperti pada tol Jakarta-Cikampek II yang setahun gratis."

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan sudah membagi jadwal penyesuaian tarif ke dalam tiga kelompok, yaitu 11 ruas tol dari awal tahun hingga April, tujuh ruas pada April hingga September, dan sisanya bertahap hingga akhir 2021. "Belum tentu naik, nanti diputuskan oleh Menteri apakah SPM terpenuhi atau tidak," kata dia.



Proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung di kawasan Cibubur, Jakarta, November 2010. TEMPO/Subeki

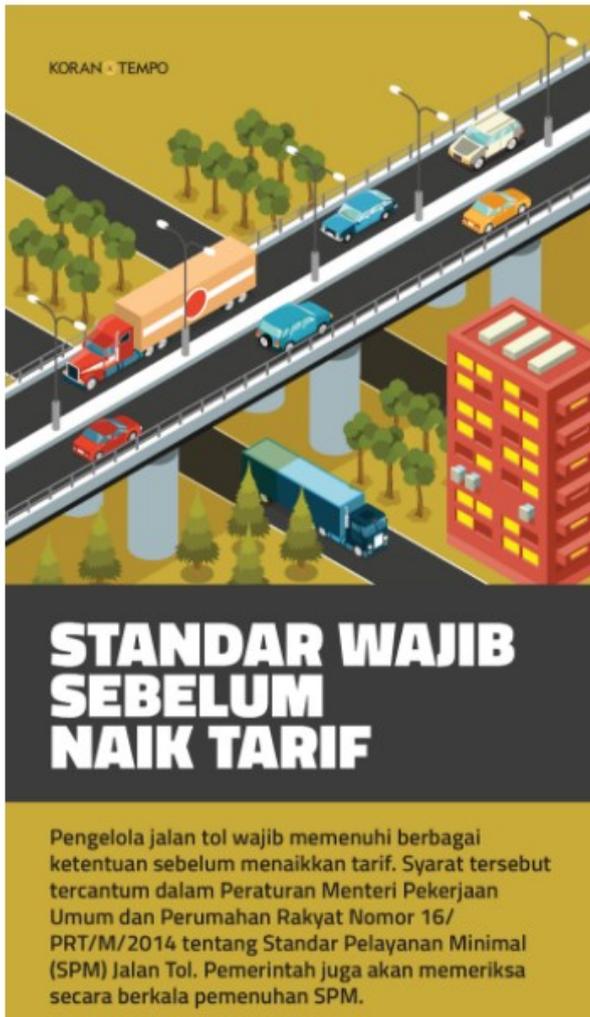
Endra mengatakan keputusan pemerintah didasari pertimbangan dari dua sisi, yaitu publik dan bisnis. Sampai akhir 2021, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan ruas tol yang beroperasi mencapai 2.756 kilometer. "Kami perhatikan kepentingan pengguna, sambil juga memastikan perjanjian pengusaha bisa terpenuhi."

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan, mengatakan sudah menunaikan syarat SPM lewat PT Jasa Marga Tollroad Maintenance, anak usaha yang bergerak dalam bidang pemeliharaan konstruksi dan kelengkapan jalan. Adapun layanan transaksi dijaga oleh PT Jasa Marga Tollroad Operator, sedangkan area rehat dikelola oleh PT Jasa Marga Related Business. "Masing-masing *regional office* mengawasi dan memastikan SPM terpenuhi," ucapnya.

Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Arief Safari, mengatakan kenaikan tarif menjadi hak operator untuk mengembalikan investasi yang mereka keluarkan. Namun dia mendesak BPJT untuk [mempertimbangkan kemampuan pengguna](#) jalan. Ruas-ruas tol yang tarifnya akan dinaikkan pun belum memuaskan, jika dilihat dari aspek penanganan kemacetan ataupun kondisi jalan. "Harapan konsumen adalah kenaikan ditunda sampai pemerintah mampu mengendalikan pandemi," ujarnya.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS

Judul	Infografis	Tanggal	Kamis, 4 Februari 2021
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 2		
Resume	Standar wajib sebelum naik tarif. Pengelola jalan tol wajib memenuhi berbagai ketentuan sebelum menaikkan tarif.		



SPM Operator Jalan Tol

■ Kondisi jalan

Operator wajib menjaga jalan tol dari potensi lubang, retak, perubahan tingkat rata-rata, median atau kemiringan, drainase, dan kondisi bahu jalan. Jika terjadi kerusakan, pemulihan maksimal berjalan selama 1-2 pekan.

■ Kecepatan tempuh rata-rata

Harus ada pengawasan untuk standar kecepatan kendaraan 40 km/jam buat jalan tol dalam kota dan 60 km/jam untuk jalan tol antarkota.

■ Aksesibilitas

Kecepatan rata-rata transaksi gerbang tol minimal 6 detik. Jumlah antrian maksimal 10 kendaraan per gardu.

■ Mobilitas

Operator diharuskan menangani hambatan lalu lintas secepat mungkin. Salah satunya dengan observasi dan patroli per 30 menit. Harus ada prosedur antisipasi kendaraan mogok dan kecelakaan.

■ Keselamatan

Operator wajib melengkapi rambu dan marka jalan, patokan arah dan kilometer, pagar pengaman, serta penerangan.

■ Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan

Operator harus menyediakan fasilitas pertolongan untuk kondisi khusus, dari ambulans, mobil polisi patroli, kendaraan derek, kendaraan rescue, hingga pusat informasi.

■ Lingkungan

Operator wajib memelihara keindahan serta kebersihan jalan dan bahu jalan, gardu transaksi, serta kantor atau pusat informasi.

■ Tempat istirahat (TI) serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP)

Ada standar sirkulasi keluar-masuk kendaraan hingga fasilitas minimal, seperti toilet, stasiun bahan bakar, area salat, gerai makan-minum, dan area belanja.

Jumlah dan Volume Transaksi Jalan Tol

Periode	Jumlah Transaksi (juta per tahun)	Volume Transaksi (Rp triliun per tahun)
2019	4,6	21,02
2020	3,4	19,19
Prediksi 2021	4	22,5
Target 2024	7	29,6